

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
( LKIP ) TH. 2019**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA BIMA**

**TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Kami sampaikan karena atas ijin-Nya jualah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2019 selesai disusun. LKIP disusun sebagai langkah Pemerintah dari tatakelola kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah Kota Bima melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Bima melalui Peraturan Walikota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan, kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima, dengan melaksanakan Urusan Wajib yaitu Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2019 disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dalam kurun waktu tahun 2019.

Segala upaya dan pengerahan sumber daya telah dilakukan dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi-misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan LKIP 2019 adalah wujud dari pertanggungjawaban kami tentang semua itu.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya LKIP, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 ini, dan tidak lupa pula kami meminta maaf atas berbagai kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan. Semoga laporan ini bermfaat dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya, terutama untuk mendukung pencapaian kinerja pada tahun-tahun yang akan datang dalam pembangunan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Raba-Bima, Februari 2020

Kepala,  
  
**H. AHMAD, SE**  
NIP. 19630213 199203 1 006

## DAFTAR ISI

Halaman	
Judul .....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar isi .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Tugas, fungsi dan Strukur Organisasi.....	2
1.2.1. Tugas, fungsi .....	2
1.2.2. Struktus Organisasi .....	19
1.3.Sumber Daya, Sarana dan Prasarana .....	20
1.3.1. Sumber Daya.....	20
1.3.2. Sarana dan Prasarana.....	21
1.4.Isu Strategis dan Permasalahan Yang Dihadapi .....	22
BAB.II. PERENCANAAN KINERJA.....	24
2.1 Perencanaan Kinerja Jangka Menengah.....	24
2.2 Penjelasan Indikator Kinerja Utama tahun 2019 .....	25
2.3 Rencana Kinerja tahunan.....	29
2.4 Penetapan kinerja Tahun 2019 .....	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	35
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	35
3.1. Membandingkan antara Target dan realisasi Kinerja tahun 2019 .....	36
3.2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja tahun ini dgn Tahun Lalu dan beberapa tahun terakhir .....	44
3.3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dgn tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi .....	59
B. Realisasi Anggaran.....	59
BAB.IV PENUTUP .....	64
4.1. Kesimpulan .....	64
4.2. Rekomendasi pemecahan masalah .....	65

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

### 1.1. Latar Belakang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2019 sebagai salah satu perangkat daerah di Kota Bima melaksankan akan urusan wajib perencanaan pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima juga mengedepankan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang baik. Salah satu wujud penerapan tatakelola pemerintahan yang baik tersebut adalah adanya kewajiban Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima untuk menyusun laporan kinerja. Laporan Kinerja tersebut disusun sesuai dengan ketentuan dan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa pimpinan masing-masing SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing SKPD. Kemudian setiap SKPD menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, menyatakan bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima tahun 2019 ini, mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima 2019–2023 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2018-2023, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2019, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun 2019 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kota Bima.

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas kepada Walikota dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) mengenai capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota selama tahun 2019.

## 1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

### 1.2. Latar Belakang

#### 1.2.1. Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima tahun 2019 menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan Anggaran Dinas;
2. Penyelenggaraan program pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
3. Penyelenggaraan program penguatan dan jaringan Kelembagaan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
4. Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dengan instansi pemerintah/LSM Swasta dan masyarakat dibidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
5. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Penguatan kelembagaan
  - Penataan organisasi: Terbentuknya DPP dan PA, dan masih Kurangnya SDM
  - Ada beberapa produk hukum Daerah terkait dengan pemberdayaan perempuan dan hak anak
7. Kualitas dan pemanfaatan data mikro kekerasan untuk perencanaan di berbagai SKPD
8. Data dasar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum tersedia
9. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga, pola asuh dan tumbuh kembang anak, serta kualitas lingkungan keluarga dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
10. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan program, termasuk peningkatan kinerja, kualitas SDM dan pengembangan sistem manajemen.
11. Penguatan Kapasitas Kelembagaan PUG dan, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak;
12. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi ini dijabarkan lebih lanjut pada unit organisasi sebagai berikut :

A. Kepala Dinas PP dan PA Kota Bima.

Mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- Menyusun program dan anggaran;
- Pengelolaan Keuangan;
- Pengelolaan kelengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah/negara;
- Pengelolaan urusan ASN;
- Penyusunan perencanaan dibidang kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, data dan informasi, bidang pemenuhan hak anak serta bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
- Perumusan kebijakan teknis dibidang kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga pemenuhan hak anak serta bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
- Pelaksanaan pelayanan PP dibidang ekonomi, sosial politik dan hukum serta kualitas keluarga, data dan informasi;
- Pelaksanaan pelayanan pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Pelaksanaan pelayanan hak sipil, informasi dan partisipasi;
- Pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Pelaksanaan pelayanan perlindungan khusus anak dan perempuan;
- Pelaksanaan pelayanan kekerasan perempuan dan anak;
- Pelaksanaan kerja sama administrasi PP dan perlindungan anak;
- Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang PP dan PA;
- Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas PP dan PA; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris Dinas PP dan PA membantu tugas Kepala Dinas PP dan PA, yaitu Mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan penyusunan program dan pelaporan agar tugas-tugas dan kegiatan pada lingkup Dinas PP dan PA Kota Bima dapat berjalan lancar. Mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur dilingkungan Dinas

- Pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
- Pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan organisasi dan tatalaksana, tata usaha dan rumah tangga dilingkungan Dinas;
- Penyelenggaraan pelayanan kehumasan;

- Pengelolaan urusan keuangan dan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara dilingkungan Dinas; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya. di bantu oleh :
  - a. Kasubag Umum dan Kepegawaian Mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik daerah/negara:
    - Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - Pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan Pegawai;
    - Pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan berkala, Jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
    - Pelaksanaan urusan Tata usaha, kearsipan, rumah tangga keamanan dan kebersihan;
    - Pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/negara;
    - Pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
    - Penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan kepegawaian; dan
    - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya
  - b. Kasubag Perencanaan dan Keuangan membawahi Bendahara rutin, Gaji, Gudang, Pembantu penerima. Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
    - Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    - Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program;
    - Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dibidang PP dan PA;
    - Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    - Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik dibidang PP dan PA;
    - Pemananaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    - Penyusunan laporan dibidang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji perbendaharaan, pengolahan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;

- Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian revisi anggaran; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Serta melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, fasilitas teknis dan laporan yang meliputi pelaksanaan koordinasi dan pengendalian dalam program dan penyusunan laporan dan melakukan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, evaluasi dan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran dan penyusunan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas.

#### C. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Gender

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang PP dan Gender :

- Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP dibidang Ekonomi, Sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP dibidang Ekonomi, Sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gendre dan PP dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender PP dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;



- Penyiapan fasilitas dan distribusi, kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pengumpulan data dan informasi gender PP dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
- Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya. di bantu oleh :

1. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Gender dibidang Ekonomi mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan dibidang ekonomi;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP dibidang Ekonomi;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan dibidang ekonomi;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan dibidang ekonomi;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP dibidang ekonomi;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan dibidang ekonomi;
- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, data dan informasi gender dibidang ekonomi;

- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi;
  - Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi, kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi;
  - Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi Gender dibidang ekonomi;
  - Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender dibidang ekonomi;
  - Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan dibidang ekonomi;
  - Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi
2. Saksi Pemberdayaan Perempuan dan Gender sosial politik dan Hukum mempunyai tugas :
- Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP dibidang sosial, politik dan hukum;
  - Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gendre dan PP dibidang sosial, politik dan hukum;
  - Penyiapan perumusan kajian. Penyiapan Koordinasi dan sinkronisasi. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan adistribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP dibidang sosial, politik dan hukum;
  - Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi. Penerapan kebijakan peaksanaan pengarusutamaan dan PP dibidang sosial politik dan hukum;
  - Pemanatauan analisis, evaluasi dan pelaporan .penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaam gender da PP dibidang sosial politik dan hukum;
  - Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang sosial politik dan hukum;
  - Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang sosial, politik dan hukum;
  - Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi. Penyajian koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi gender dibidang sosial, politik dan hukum;
  - Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervis gender dibidang sosial, politik dan hukum;

- Penyiapan kelembagaan pengarusutamaan gender dibidang ekonomi;
  - Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan dibidang ekonomi; dan
  - Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang sosial, politik dan hukum.
3. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Gender Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi mempunyai tugas :
- Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP dibidang kualitas keluarga.
  - Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP dibidang kualitas keluarga;
  - Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP dibidang kualitas keluarga;
  - Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP dibidang kualitas keluarga;
  - Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP dibidang kualitas keluarga;
  - Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP dibidang kualitas keluarga;
  - Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan PP dibidang kualitas keluarga;
  - Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang kualitas keluarga;
  - Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan data dan informasi gender dibidang kualitas keluarga;
  - Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi gender dibidang kualitas keluarga;
  - Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengumpulan data dan informasi gender dibidang kualitas keluarga;
  - Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi gender dibidang kualitas keluarga;
  - Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; dan
  - Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang kualitas keluarga.

E. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- Penyipian koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan kesehatan dan kesejahteraan dan pendidikan kreativitas dan keluarga budaya;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kabijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan , serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- Penyiapan analisis, evaluasi dan pelaporan, penerapan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pemenuhan hak anak;
- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan,pengolahan dan penyajian data dan informasi dibidang pemenuhan hak anak;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data informasi dibidang pemenuhan hak anak;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pemenuhan hak anak;
- Penyiapan fasilitas sosialisasi san distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajin data dan informasi dibidang pemenuhan hak anak;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data informasi dibidang pemenuhan hak anak;
- Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;

- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; dan
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pemenuhan hak anak. di bantu oleh :

1. Saksi Hak Pendidikan dan Budaya.mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan perumusan kajian. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemenuhan hak anak dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan Fasilitas,sosialisasi dan distribusi. Penyiapan Pemberian bimbingan teknis dan supervisi. Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan pemenuhan hak anak dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan penyajian data dan informasi dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kabijakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan, analisis dan penyajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyedia data dan informasi dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

- Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang kegiatan budaya .

2. Saksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi. mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan perumusan kajian. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemenuhan hak anak dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi. Penyiapan Pemberian bimbingan teknis dan supervisi. Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan pemenuhan hak anak dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan penyajian data dan informasi dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan, analisis dan penyajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyedia data dan informasi dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang

pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang kegiatan budaya .

3. Saksi Kesehatan Dasar dan kesejahteraan, mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;

- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan penguatan dan pengembangan penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan.

F. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan perumusan kebijakan dibidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah



tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang pencegahan terhadap penanganan kekerasan perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan penguatan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketegakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporanemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan daerah terkait dengan tugas dan fungsinya. di bantu oleh :

a. Saksi Perlindungan Perempuan.mempunyai tugas :

- Penyiapan perumusan kajian dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan perumusan kebijakan dibidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus setta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga,

dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana dan perdagangan orang;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi, evaluasi dan distribusi kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang perlindungan dan PP korban kekerasan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan dibidang ketenagakerjaan, dalam kondisi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  - Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dibidang perlindungan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  - Pemantauan analisis, sosialisasi, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondididi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; dan
  - Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang perlindungan dan PP korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- b. Saksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas :
- Penyiapan perumusan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
  - Penyiapan forum koordinasi Penyusunan Kebijakan dibidang perlindungan khusus anak.
  - Penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
  - Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
  - Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
  - Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisis penerapan kebijakandibidang perlindungan khusus anak;
  - Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus anak; dan Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak.
3. Saksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak.mempunyai tugas :
- Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analiasa dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Kelompok Jabatan Fungsional
  3. Staf.

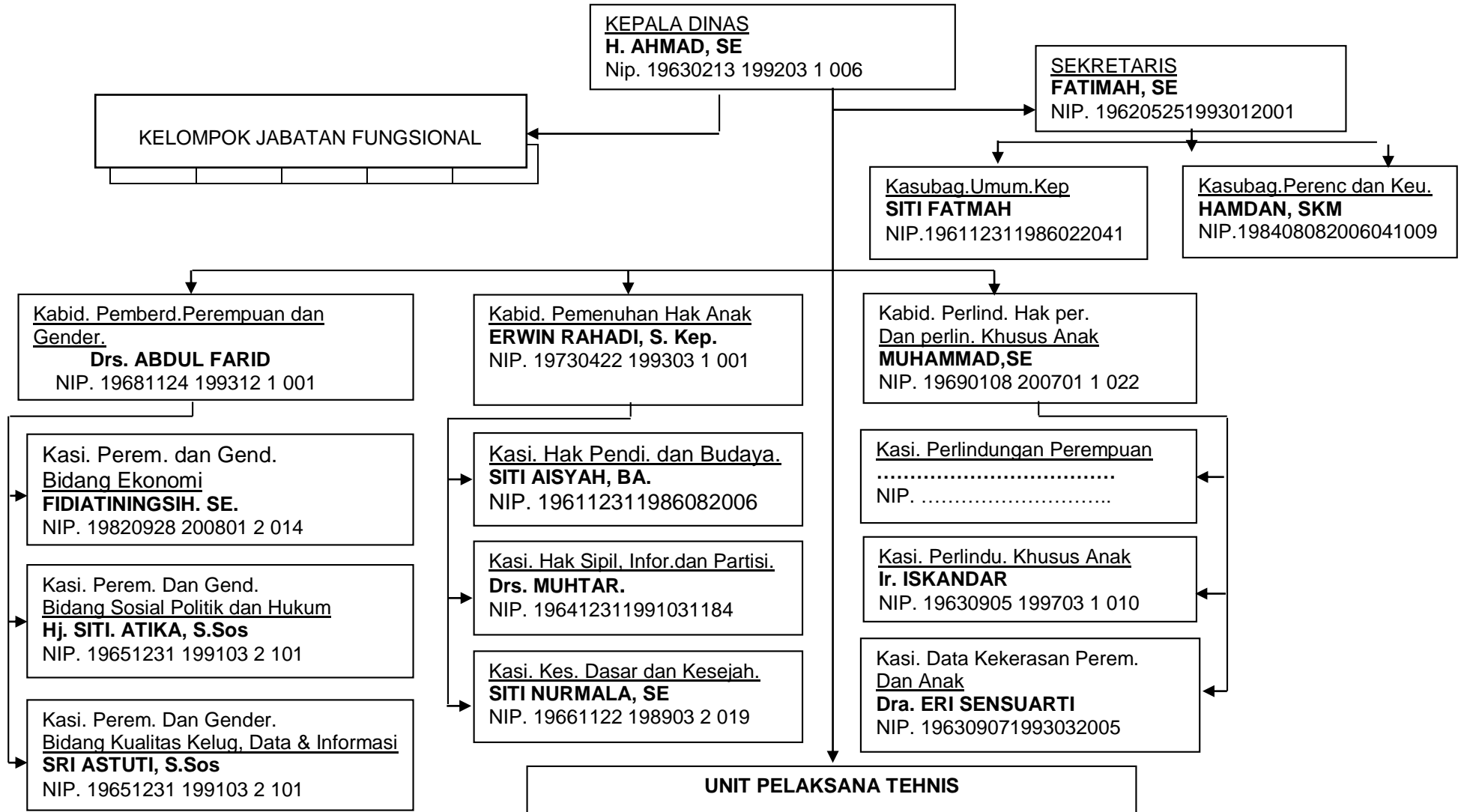
### **1.2.2. Struktur Organisasi**

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima;
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, yang terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
  - a. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Gender
    - i. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Gender dibidang Ekonomi
    - ii. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Gender sosial politik dan Hukum
    - iii. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Gender Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi
  - b. Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai
    - i. Seksi Hak Pendidikan dan Budaya
    - ii. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi
    - iii. Seksi Kesehatan Dasar dan kesejahteraan
  - c. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
    - i. Saksi Perlindungan Perempuan
    - ii. Saksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
    - iii. Saksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak
4. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Staf

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima adalah sebagaimana di bawah ini.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima



## 1.3. Sumber Daya, Sarana dan Prasarana

### 1.3. Sumber Daya, Sarana dan Prasarana

#### 1.3.1. Sumber Daya

Dalam melaksanakan kegiatan untuk pencapaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima harus di dukung oleh sumber daya yang berkualitas baik dari segi sarana dan prasarana pendukung. dari sisi sumberdaya manusia, masih belum memadai baik itu secara kuantitas maupun secara kualitas, tetapi dengan memanfaatkan pola tanggungjawab dan jalur koordinasi yang semakin baik, maka dapat mendukung pencapaian kinerja dengan baik pula.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penentu dalam mencapai keberhasilan organisasi. Berikut informasi terkait dengan SDM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima per 31 Desember 2019.

a. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

Gambaran jumlah pegawai berdasarkan pendidikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1: Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima  
Tahun 2019

No.	Pegawai	Jumlah
1.	S1	17
2.	Diploma 3	2
3.	SMA / sederajat	2
4.	SD	1

Uraian analisis kondisi pegawai perangkat daerah berdasarkan tingkat pendidikan belum terpenuhi.

b. Jumlah pegawai berdasarkan eselonering

Gambaran jumlah pegawai berdasarkan eselonering Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2: Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima  
Tahun 2019

No.	Pegawai	Jumlah
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	4
3.	Eselon IV	10
4.	Eselonering	-
	<b>Total</b>	<b>15</b>

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Gambaran jumlah pegawai berdasarkan golongan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3: Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima  
Tahun 2019

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	1	0	1
2	Golongan II	1	0	1
3	Golongan III	2	11	13
4	Golongan IV	5	2	7

**1.3.2. Sarana dan Prasarana**

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:

**Tabel 1.4**  
**Sarana dan Prasarana**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima**  
**Tahun 2019**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	AC	3	2	5
2	Dispenser	3		3
3	Filling Besi/Metal	5		5
4	Hardisk External	1	1	2
5	Komputer PC	9		9
6	Kursi Kerja	38		38
7	Kursi Rapat Plastik	49		49
8	Kursi Tamu	1		1
9	Laptop	11	5	16
10	Lemari Arsip	5		5
11	Lemari Besi/Metal	1		1
12	Lemari Es (Kulkas)	1		1
13	Lemari Kayu	3		3
14	Meja 1/2 Biro	14		14
15	Meja Biro	15		15
16	Meja Kerja	26		26
17	Mesin Ketik Manual Portable	1		1
18	Printer	8	4	12
19	Rak Kayu	2	1	3
20	LCD Proyektor	1		1

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
21	Sound System	1		1
22	Tape Recorder		1	1
23	Televisi	4		4
24	UPS	3		3
	<b>Jumlah</b>	<b>205</b>	<b>14</b>	<b>219</b>

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima kebutuhan ruangan kerja masih belum memadai sesuai tuntutan dan kompleksitas permasalahan uraian analisis kondisi sarana dan prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan yang dihadapi sehingga dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas. Selain itu, ruang pertemuan yang memadai dan representatif untuk mendukung kelancaran operasional tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP dan PA) Kota Bima pun belum tersedia.

Fasilitas perkantoran yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP dan PA) Kota Bima sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Meubelair, antara lain berupa meja, kursi, rak buku, dan lemari;
- b. Fasilitas Komunikasi, berupa jaringan telepon, jaringan internet, dan mesin faksimili;
- c. Perangkat komputer (laptop) untuk mendukung kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis, dilengkapi dengan ketersediaan printer, dan server Internet;
- d. Peralatan pendukung pekerjaan, seperti kamera digital, mesintik, dan LCD proyektor;
- e. Perlengkapan elektronik lain yang mendukung kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan, seperti Kulkas, *air conditioner* (AC), kipas angin, dan televisi;

Kendaraan dinas berupa mobil dan sepeda motor.

## 1.4. Isu-Isu Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi

### 1.4. Geografi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima sebagai SKPD yang mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis perencanaan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak dihadapkan beberapa isu strategis yang antara lain adalah sebagai berikut :



1. Masih terbatasnya data dan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan; Data dan informasi merupakan salah satu elemen vital guna mendukung kegiatan PP dan PA. Kekurangan dan keterbatasan data dan informasi tersebut diharapkan menjadi pertimbangan dan bahan masukan penting demi penyediaan dan penyempurnaan data-data pendukung yang diperlukan dalam perencanaan Dinas PP dan PA.
2. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama *stakeholders* dengan Dinas PP dan PA. Kota Bima.
3. Dinas PP dan PA. Kota Bima. harus terus meningkatkan partisipasi dan kerjasama dengan berbagai *stakeholder* yang ada di Kota Bima seperti masyarakat, DPRD, Perguruan Tinggi, dan lain sebagainya. Peningkatan partisipasi dan kerjasama ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan efektifitas perencanaan di Dinas PP dan PA. Kota Bima.
4. Belum optimalnya pelayanan prima dalam Dinas PP dan PA sebagai lembaga teknis daerah yang berfungsi sebagai pelayanan publik dalam bidang PP dan PA, maka sudah tentu Dinas PP dan PA Kota Bima harus berorientasi pada pelayanan prima dan ini dilakukan terlebih dahulu dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dalam melayani publik. Pelayanan prima ini diharapkan bisa menimbulkan kepuasan (*satisfaction*) bagi pihak-pihak yang terkait dengan Dinas PP dan PA. Kota Bima, terutama masyarakat Kota Bima.
5. Belum optimalnya kapasitas aparatur Dinas PP dan PA Kota Bima. Keberadaan aparatur PP dan PA merupakan unsur penting dalam setiap pengambilan keputusan perencanaan, oleh karenanya peningkatan kapasitas aparatur merupakan sebuah komitmen untuk meningkatkan kualitas dalam bidang PP dan PA.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima sebagai Dinas teknis dituntut untuk selalu tanggap dan responsive terhadap dinamika serta perubahan-perubahan yang terjadi baik secara internal wilayah maupun secara eksternal. Disamping itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima juga dituntut untuk mampu menerapkan berbagai pendekatan perencanaan dalam konteks dan waktu yang tepat untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dan kebutuhan berbagai kelompok atau pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima sebagai perangkat daerah di Kota Bima. Berkaitan dengan hal tersebut telah merumuskan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai sebagai bagian dari perwujudan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima telah merumuskan tujuan dan sasaran untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, guna mewujudkan Visi Kota Bima “**Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri**” dan untuk mewujudkan Visi Kota Bima tersebut maka dijabarkan kedalam 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kota Bima sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat **Berkualitas** yang Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Masyarakat **Sejahtera** melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan;
3. Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
4. Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan **Ramah**, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana;
5. Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan **Agamais**

Visi dan misi yang sudah dirumuskan perlu dilengkapi dengan tujuan, sasaran serta indikator kinerja untuk memudahkan langkah pelaksanaannya maupun pengukuran hasil atau tingkat capaian dari visi dan misi tersebut.

Adapun pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima beserta indikator kinerja setiap tahunnya disajikan sebagaimana berikut ini:

Tabel 2.1.  
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	TARGE T	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan	Nilai APE( Anugrah Parahita Ekapraya)	Madya	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Genger (IDG)	61,73 %	63,25 %	64,77 %	66,29 %	67,81 %
			Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Angka KDRT	0,63%	0,60%	0,58%	0,56%	0,55%
				Angka Kekerasan terhadap anak	0,095 %	0,086 %	0,067 %	0,057 %	0,057 %
Mewujudkan Kota layak anak	Penghargaan Kota Layak Anak	Pratama	Meningkatnya Pemenuhan hak anak	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	20%	40%	60%	80%	100%

## 2.2. Penjelasan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima telah menetapkan Indikator Kinerja utama (IKU) tahun 2019 sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU ini telah mempedomani indikator kinerja daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2018-2023 serta dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2018-2023. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang berfokus pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima.

Penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2019 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2.  
Penjelasan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN
Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IGD adalah merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang - bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik.  IDG: $1/3 (Ipar+IDM+Lin-Dist)$  Ipar = Indeks keterwakilan di parlemen IDM = Indeks pengambilan keputusan Lind-dis = Indeks distribusi pendapatan
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Angka KDRT	$\frac{\text{Jumlah KDRT}}{\text{Jumlah Rumah Tangga (RT)}} \times 100\% = \dots\%$
	Angka Kekerasan terhadap anak	$\frac{\text{Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap anak}}{\text{Jumlah Anak Usia > 18 thn..... Org}} \times 100\% = \dots\%$
Meningkatnya Pemenuhan hak anak	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	$\frac{\text{Jumlah Kecamatan Layak Anak ...}}{\text{Jumlah Kecamatan yang ada..... Org}} \times 100\% = \dots\%$

Tabel 2.3.  
Penjelasan Indikator Kinerja Sasaran Eselon III & IV Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR
1	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	persentase organisasi perempuan yang dibina	$\frac{\text{Jumlah organisasi perempuan yang dibina}}{\text{Jumlah organisasi perempuan yang ada..... Org}} \times 100\% = \dots\%$
		Pembinaan organisasi perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan yang di bina	Kumulatif Jumlah peserta pembinaan Organisasi Perempuan
		Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender	Jumlah kader gender yang dibina	Kumulatif Jumlah kader Politik
		Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	$\frac{\text{Jml perempuan pd lembaga pemerintah & swasta}}{\text{Jumlah perempuan yang ada..... Org}} \times 100\% = \dots\%$

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR
		Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah kader PUG di kota Bima	Kumulatif Jumlah kader PUG di Kota Bima
		Penyusunan dan Penerbitan Prodak Hukum Daerah dibidang Perlind. Peremp.	Jumlah Perwali Perlindungan Perempuan	Kumulatif Jumlah perwali perlindungan perempuan
2	<b>Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	<b>Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditangani</b>	<b>(Jumlah pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditangani / Jumlah pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang ada) 100%</b>
			<b>Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Anak yang ditangani</b>	<b>(Jumlah pengaduan tindak kekerasan terhadap anak yang ditangani / Jumlah pengaduan tindak kekerasan terhadap anak yang ada) 100%</b>
		Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dlm pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Jumlah Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Kumulatif jumlah peserta peningkatan kualitas SDM dan pendampingan korban KDRT
		Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan	Jumlah Data kesepakatan organisasi dan Lembaga masyarakat yang ada dalam sistim perlindungan anak melalui aturan tentang PUP	Kumulatif jumlah kesepakatan warga
		Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	- Jumlah kelompok usaha ekonomi produktif bagi perempuan EX TKI. - Jumlah alat produksi Kue	- Kumulatif jumlah kelompok usaha ekonomi  - Kumulatif jumlah alat2 produksi kue
		Pelaksanaan kebijakan perlindungan Hak perempuan dan Anak di daerah	Jumlah data KDRT di lima Kecamatan se Koyta Bima	Kumulatif jumlah data KDRT di lima kecamatan
		Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Adanya laporan terhadap sistim Catpor kekerasan perempuan dan anak secara falid	Kumulatif jumlah peserta sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR
		Kegiatan Pendampingan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Jumlah Data kekerasan khusus anak di tingkat kecamatan dan kota	kumulatif Data kekerasan khusus anak di tingkat kecamatan dan kota
		<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	<b>Persentase OPD Yang menganggarkan PUG</b>	<b>(Jumlah OPD yang menganggarkan PUG / Jumlah OPD yang ada ) x 100%</b>
			<b>Porsentase lembaga PUG yang Aktif</b>	<b>(Jumlah lembaga PUG yang aktif / Jumlah PUG yang ada ) x 100%</b>
		Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG	Kumulatif jumlah OPD yang melaksanakan PPRG
		Kegiatan pengemb. pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan P2TP2A	Jumlah peserta P2TP2A yang berkualitas pada 5 Kecamatan	Kumulatif Jumlah peserta P2TP2A yang berkualitas pada 5 Kecamatan
		Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan	Jumlah peserta Pelatihan Kewirausahaan dan kelompok usaha ekonomi ekonomi produktif bagi perempuan	Kumulatif peserta pelatihan kewirausahaan
		Pembinaan/Evaluasi pelaksanaan PUG	Jumlah Data SKPD terpilah yang responsif gender	Kumulatif jumlah SKPD yang memiliki data terpilah
		Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Jumlah perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan serta eksploitasi dan penelantaran lainya terhadap anak	Kumulatif Jumlah perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan serta exsplotasi dan penelantaran lainya terhadap anak
<b>3</b>	<b>Meningkatnya Pemenuhan hak anak</b>	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	<b>Prosentase Kelompok Forum Anak yang Aktif</b>	<b>(Jumlah Kelompok Forum Anak yang Aktif / Jumlah Kelompok Anak yang ada ) x 100 %</b>
		Pengembangan Kota Sebagai Kota Layak Anak (KLA)	- Jumlah Gugus Tugas Tingkat Kecamatan	Kumulatif jumlah gugus tugas tingkat kecamatan
		Pengembangan sistem informasi Pendataan Kelompok Anak di dalam Sekolah.	Jumlah Kelompok PATBM	Kumulatif jumlah kelompok PATBM
		Penguatan Kelompok Forum Anak	Jumlah Duta Forum anak yang terpilih	Kumulatif jumlah duta forum anak yang terpilih
		Pemetaan anak bermasalah dan potensi Partisipasi Anak	Jumlah Buku Pofil Anak	Kumulatif jumlah dokumen profil anak
		Pembentukan dan Pembinaan Kota Layak Anak	Jumlah Kelurahan Layak Anak	Kumulatif jumlah kelurahan layak anak

### 2.3. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2019 dijabarkan berdasarkan Indikator Kinerja utama (IKU) dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2018-2023 dan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima tahun 2019.

Tabel 2.4.  
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN
Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61.73%
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Angka KDRT	0.63%
	Angka Kekerasan terhadap anak	0.095%
Meningkatnya Pemenuhan hak anak	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	20%

Tabel 2.5.  
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Indikator Kinerja Sasaran Eselon III & IV  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET
1	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	persentase organisasi perempuan yang dibina	70,00%
		Pembinaan organisasi perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan yang di bina	30 organisasi perempuan
		Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender	Jumlah kader gender yang dibina	35 kader
		Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	46,52%
		Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah kader PUG di kota Bima	60 org
		Penyusunan dan Penerbitan Prodak Hukum Daerah dibidang Perlind. Peremp.	Jumlah Perwali Perlindungan Perempuan	1 perwali

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	
2	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	100%	
			Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Anak yang ditangani	100%	
			Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dlm pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Jumlah Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan dan pendampingan korban KDRT	40 org
			Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan	Jumlah Data kesepakatan organisasi dan Lembaga masyarakat yang ada dalam sistim perlindungan anak melalui aturan tentang PUP	3 kesepakatan
			Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	- Jumlah kelompok usaha ekonomi produktif bagi perempuan EX TKI. - Jumlah alat produksi Kue	- 112 org. - 28 pkt
			Pelaksanaan kebijakan perlindungan Hak perempuan dan Anak di daerah	Jumlah data KDRT di lima Kecamatan se Koyta Bima	40 org
			Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Adanya laporan terhadap sistim Catpor kekerasan perempuan dan anak secara falid	120 org
			Kegiatan Pendampingan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Jumlah Data kekerasan khusus anak di tingkat kecamatan dan kota	40 orang
			<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	<b>Persentase OPD Yang menganggarkan PUG</b>	<b>25%</b>
				<b>Porsentase lembaga PUG yang Aktif</b>	<b>32,52%</b>
			Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG	28 OPD
			Kegiatan pengemb. pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan P2TP2A	Jumlah peserta P2TP2A yang berkualitas pada 5 Kecamatan	40 orang
			Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan	Jumlah peserta Pelatihan Kewirausahaan dan kelompok usaha ekonomi produktif bagi perempuan	40 org
			Pembinaan/Evaluasi pelaksanaan PUG	Jumlah Data SKPD terpilah yang responsif gender	28 SKPD
	Pengembangan Sistim Informasi Gender dan Anak	Jumlah perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan serta exsploitasi dan penelantaran lainnya terhadap anak	50 org		
3	Meningkatnya Pemenuhan hak anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	<b>Prosentase Kelompok Forum Anak yang Aktif</b>	<b>23,40%</b>	
			Pengembangan Kota Sebagai Kota Layak Anak (KLA)	- Jumlah Gugus Tugas Tingkat Kecamatan	2 kecamatan
			Pengembangan sistem informasi Pendataan Kelompok Anak di dalam Sekolah.	Jumlah Kelompok PATBM	13 kelompok



NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET
		Penguatan Kelompok Forum Anak	Jumlah Duta Forum anak yang terpilih	3 Org
		Pemetaan anak bermasalah dan potensi Partisipasi Anak	Jumlah Buku Pofil Anak	1 dokumen
		Pembentukan dan Pembinaan Kota Layak Anak	Jumlah Kelurahan Layak Anak	7 Kelurahan

## 2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsian wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini, penerima amanah adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2019, sedangkan pemberi amanah adalah Walikota Bima.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun 2019, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja ini, antara lain sebagai berikut :

- a. sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dan Walikota Bima untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan
- d. Sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2019 terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja utama. Anggaran yang mendukung dalam Pencapaian indikator kinerja ini dilakukan melalui 8 (delapan) program dan kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.923.540.200. Berikut tabel perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2019.

Tabel 2.6.  
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2019
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Genger (IDG)	61.73%
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Angka KDRT	0.63%
	Angka Kekerasan terhadap anak	0.095%
Meningkatnya Pemenuhan hak anak	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	20%

Program :	Anggaran	Ket.
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 575.670.200,-	
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp. 96.405.000,-	
3 Program Peningkatan disiplin Aparatur	Rp. 22.760.000,-	
4 Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Rp. 138.245.000,-	
5 Program Keserasian kebijakan peningk. kualitas Anak & Perempuan.	Rp. 122.600.000,-	
6 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp. 489.072.000,-	
7 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp. 330.951.500,-	
8 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Rp. 147.836.500,-	

Adapun perjanjian kinerja Eselon III dan IV yang mendukung pencapaian Indikator Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7.  
Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET
1	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	persentase organisasi perempuan yang dibina	70,00%
		Pembinaan organisasi perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan yang di bina	30 organisasi perempuan
		Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender	Jumlah kader gender yang dibina	35 kader

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET
		<b>Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan perempuan</b>	<b>Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta</b>	<b>46,52%</b>
		Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah kader PUG di kota Bima	60 org
		Penyusunan dan Penerbitan Prodak Hukum Daerah dibidang Perlind. Peremp.	Jumlah Perwali Perlindungan Perempuan	1 perwali
<b>2</b>	<b>Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	<b>Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditangani</b>	<b>100%</b>
			<b>Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Anak yang ditangani</b>	<b>100%</b>
		Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dlm pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Jumlah Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan dan pendampingan korban KDRT	40 org
		Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan	Jumlah Data kesepakatan organisasi dan Lembaga masyarakat yang ada dalam sistim perlindungan anak melalui aturan tentang PUP	3 kesepakatan
		Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	- Jumlah kelompok usaha ekonomi produktif bagi perempuan EX TKI. - Jumlah alat produksi Kue	- 112 org. - 28 pkt
		Pelaksanaan kebijakan perlindungan Hak perempuan dan Anak di daerah	Jumlah data KDRT di lima Kecamatan se Koyta Bima	40 org
		Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Adanya laporan terhadap sistim Catpor kekerasan perempuan dan anak secara falid	120 org
		Kegiatan Pendampingan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Jumlah Data kekerasan khusus anak di tingkat kecamatan dan kota	40 orang
		<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	<b>Persentase OPD Yang menganggarkan PUG</b>	<b>25%</b>
			<b>Porsentase lembaga PUG yang Aktif</b>	<b>32,52%</b>
		Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG	28 OPD
		Kegiatan pengemb. pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan P2TP2A	Jumlah peserta P2TP2A yang berkualitas pada 5 Kecamatan	40 orang
		Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan	Jumlah peserta Pelatihan Kewirausahaan dan kelompok usaha ekonomi produktif bagi perempuan	40 org
		Pembinaan/Evaluasi pelaksanaan PUG	Jumlah Data SKPD terpilih yang responsif gender	28 SKPD

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET
		Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Jumlah perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan serta eksploitasi dan penelantaran lainnya terhadap anak	50 org
<b>3</b>	<b>Meningkatnya Pemenuhan hak anak</b>	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	<b>Prosentase Kelompok Forum Anak yang Aktif</b>	<b>23,40%</b>
		Pengembangan Kota Sebagai Kota Layak Anak (KLA)	- Jumlah Gugus Tugas Tingkat Kecamatan	2 kecamatan
		Pengembangan sistem informasi Pendataan Kelompok Anak di dalam Sekolah.	Jumlah Kelompok PATBM	13 kelompok
		Penguatan Kelompok Forum Anak	Jumlah Duta Forum anak yang terpilih	3 Org
		Pemetaan anak bermasalah dan potensi Partisipasi Anak	Jumlah Buku Profil Anak	1 dokumen
		Pembentukan dan Pembinaan Kota Layak Anak	Jumlah Kelurahan Layak Anak	7 Kelurahan

# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

## A. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan kinerja pemerintah merupakan wujud nyata instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program, hal tersebut dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan guna mewujutkan Visi dan Misi dari Kepala Daerah.

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja. Pengukuran kinerja tersebut membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasinya. Pembahasan berikut menunjukkan pencapaian sasaran strategis dan indikator-indikator kinerjanya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja.

Kerangka Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menggunakan peraturan yang ada, *pertama*, untuk melakukan pengukuran dan evaluasi capaian kinerja menggunakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yaitu membandingkan antara target kinerja, indikator, sasaran strategis dan/atau indikator kinerja utama (IKU) yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Berikutnya, *kedua*, dalam melakukan penarikan simpulan terhadap kategori capaian kinerja dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

**Tabel 3.1**  
**Interval Capaian Indikator Kinerja Sasaran**

No	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kategori Penilaian Capaian Kinerja
I	> 90 %	Sangat Tinggi
II	75% s/d 90%	Tinggi
III	65% s/d 75%	Sedang
IV	50% s/d 65%	Rendah
V	< 50 %	Sangat Rendah

Sumber Data: Permendagri 54 tahun 2010

### **3.1. Membandingkan antara target dan realisasi capaian kinerja tahun 2019**

Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima, merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capai) dan masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2019.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima seperti yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2019**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Genger (IDG)	61.73%	65.42%	105.98%
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Angka KDRT	0.63%	0.146%	176.83%
	Angka Kekerasan terhadap anak	0.10%	0.072%	128.00%
Meningkatnya Pemenuhan hak anak	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	20%	60%	300.00%

Dari Tabel di atas, dapat diketahui bahwa indikator Kinerja sudah mencapai target. Sehingga dapat dikatakan bahwa secara umum pencapaian kinerja bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak cukup berhasil.

Keberhasilan capaian kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang menghasilkan *output* kegiatan Tahun 2019. Berikut gambaran capaian indikator program dan kegiatan eselon III dan IV Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2019, seperti pada table di bawah ini:

**Tabel 3.3 Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV Tahun 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN
1	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	persentase organisasi perempuan yang dibina	70%	100%	142,86%
		Pembinaan organisasi perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan yang di bina	30 organisasi perempuan	30 organisasi perempuan	100
		Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender	Jumlah kader gender yang dibina	35 kader	35 kader	100
		Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	46,52%	58,55%	125,86%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN
		Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah kader PUG di kota Bima	60 org	60 org	100%
		Penyusunan dan Penerbitan Prodak Hukum Daerah dibidang Perlind. Peremp.	Jumlah Perwali Perlindungan Perempuan	1 perwali	1 perwali	100%
2	<b>Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	<b>Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditangani</b>	<b>100,00%</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
			<b>Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Anak yang ditangani</b>	<b>100,00%</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
		Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dlm pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Jumlah pelatih Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan dan pendampingan korban KDRT	40 org	40 org	100%
		Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan	Jumlah Data kesepakatan organisasi dan Lembaga masyarakat yang ada dalam sistim perlindungan anak melalui aturan tentang PUP	3 kesepakatan	3 kesepakatan	100%
		Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	- Jumlah kelompok usaha ekonomi produktif bagi perempuan EX TKI. - Jumlah alat produksi Kue	- 112 org.  - 28 pkt	- 112 org  - 28 pkt	- 100%  - 100%
		Pelaksanaan kebijakan perlindungan Hak perempuan dan Anak di daerah	Jumlah data KDRT di lima Kecamatan se Koyta Bima	40 org	40 org	100%



NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN
		Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Adanya laporan terhadap sistim Catpor kekerasan perempuan dan anak secara falid	120 org	120 org	100%
		Kegiatan Pendampingan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Jumlah Data kekerasan khusus anak di tingkat kecamatan dan kota	40 orang	40 orang	100%
		<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	<b>Persentase OPD Yang menganggarkan PUG</b>	<b>25%</b>	<b>28%</b>	<b>100%</b>
			<b>Porsentase lembaga PUG yang Aktif</b>	<b>32,50%</b>	<b>33%</b>	<b>102%</b>
		Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG	28 OPD	28 OPD	100%
		Kegiatan pengemb. pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan P2TP2A	Jumlah peserta P2TP2A yang berkualitas pada 5 Kecamatan	40 orang	40 orang	100%
		Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan	Jumlah peserta Pelatihan Kewirausahaan dan kelompok usaha ekonomi ekonomi produktif bagi perempuan	40 org	40 org	100%
		Pembinaan/Evaluasi pelaksanaan PUG	Jumlah Data SKPD terpilah yang responsif gender	28 SKPD	28 SKPD	100%
		Pengembangan Sistim Informasi Gender dan Anak	Jumlah perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan serta exsploitasi dan penelantaran lainnya terhadap anak	50 org	50 org	100%
<b>3</b>	<b>Meningkatnya Pemenuhan hak anak</b>	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	<b>Prosentase Kelompok Forum Anak yang Aktif</b>	<b>23,40%</b>	<b>23,40%</b>	<b>100%</b>
		Pengembangan Kota Sebagai Kota Layak Anak (KLA)	Jumlah Gugus Tugas Tingkat Kecamatan	2 kecamatan	3 kec	150,00%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN
		Pengembangan sistem informasi Pendataan Kelompok Anak di dalam Sekolah.	Jumlah Kelompok PATEM	13 kelompok	6 klp	46,15%
		Penguatan Kelompok Forum Anak	Jumlah Duta Forum anak yang terpilih	3 Org	3 org	100%
		Pemetaan anak bermasalah dan potensi Partisipasi Anak	Jumlah Buku Pofil Anak	1 dokumen	1 dok	100%
		Pembentukan dan Pembinaan Kota Layak Anak	Jumlah Kelurahan Layak Anak	7 lembaga	7 lembaga	100%

Adapun interval capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.4: Interval Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2019**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019	Interval Capaian Kinerja (%)				
					≤ 50	50,1 - 65	65,1 - 75	75,1 - 90	≥ 90
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Genger (IDG)	61.73%	65.42%	105.98					105.98
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Angka KDRT	0.63%	0.146%	176.83					176.83
Meningkatnya Pemenuhan hak anak	Angka Kekerasan terhadap anak	0.10%	0.072%	128.00					128.00
	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	20%	60%	300.00					300.00

Mencermati tabel diatas diketahui bahwa, dari sejumlah 4 indikator kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun

2019, hampir semua indikator kinerja memiliki capaian yang memenuhi kriteria sangat baik.

Berikut Interval capaian indicator kinerja eselon III dan IV Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2019.

**Tabel 3.4: Interval Capaian Indikator Kinerja Eselon III dan IV  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima  
Tahun 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN	INTERVAL CAPAIAN KINERJA (%)					
							≤ 50	50,1 - 65	65,1 - 75	75,1 - 90	≥ 90	
1	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	persentase organisasi perempuan yang dibina	70%	100%	142,86%						142,86%
		Pembinaan organisasi perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan yang di bina	30 organisasi perempuan	30 organisasi perempuan	100						100
		Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender	Jumlah kader gender yang dibina	35 kader	35 kader	100						100
		Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	46,52%	58,55%	125,86%						125,86%
		Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah kader PUG di kota Bima	60 org	60 org	100%						100%
		Penyusunan dan Penerbitan Prodak Hukum Daerah dibidang Perlind. Peremp.	Jumlah Perwali Perlindungan Perempuan	1 perwali	1 perwali	100%						100%
2	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	100,00%	100	100%						100%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN	INTERVAL CAPAIAN KINERJA (%)				
							≤ 50	50,1 - 65	65,1 - 75	75,1 - 90	≥ 90
			<b>Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Anak yang ditangani</b>	<b>100,00%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>
		Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dlm pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Jumlah pelatih Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan dan pendampingan korban KDRT	40 org	40 org	100%					100%
		Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan	Jumlah Data kesepakatan organisasi dan Lembaga masyarakat yang ada dalam sistim perlindungan anak melalui aturan tentang PUP	3 kesepakatan	3 kesepakatan	100%					100%
		Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	- Jumlah kelompok usaha ekonomi produktif bagi perempuan EX TKI. - Jumlah alat produksi Kue	- 112 org.  - 28 pkt	- 112 org  - 28 pkt	- 100%  - 100%					- 100%  - 100%
		Pelaksanaan kebijakan perlindungan Hak perempuan dan Anak di daerah	Jumlah data KDRT di lima Kecamatan se Koyta Bima	40 org	40 org	100%					100%
		Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Adanya laporan terhadap sistim Catpor kekerasan perempuan dan anak secara falid	120 org	120 org	100%					100%
		Kegiatan Pendampingan dan perlindungan	Jumlah Data kekerasan khusus anak di tingkat	40 orang	40 orang	100%					100%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN	INTERVAL CAPAIAN KINERJA (%)				
							≤ 50	50,1 - 65	65,1 - 75	75,1 - 90	≥ 90
		perempuan terhadap tindak kekerasan	kecamatan dan kota								
		<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	<b>Persentase OPD Yang mengganggu PUG</b>	<b>25%</b>	<b>28%</b>	<b>112%</b>					<b>112%</b>
			<b>Porsentase lembaga PUG yang Aktif</b>	<b>32,50%</b>	<b>33%</b>	<b>102%</b>					<b>102%</b>
		Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG	28 OPD	28 OPD	100%					100%
		Kegiatan pengemb. pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan P2TP2A	Jumlah peserta P2TP2A yang berkualitas pada 5 Kecamatan	40 orang	40 orang	100%					100%
		Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan	Jumlah peserta Pelatihan Kewirausahaan dan kelompok usaha ekonomi produktif bagi perempuan	40 org	40 org	100%					100%
		Pembinaan/Evaluasi pelaksanaan PUG	Jumlah Data SKPD terpilah yang responsif gender	28 SKPD	28 SKPD	100%					100%
		Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Jumlah perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan serta eksploitasi dan penelantaran lainnya terhadap anak	50 org	50 org	100%					100%
<b>3</b>	<b>Meningkatnya Pemenuhan hak anak</b>	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	<b>Prosentase Kelompok Forum Anak yang Aktif</b>	<b>23,40%</b>	<b>23,40%</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN	INTERVAL CAPAIAN KINERJA (%)				
							≤ 50	50,1 - 65	65,1 - 75	75,1 - 90	≥ 90
		Pengembangan Kota Sebagai Kota Layak Anak (KLA)	Jumlah Gugus Tugas Tingkat Kecamatan	2 kecamatan	3 kec	150,00%					150,00%
		Pengembangan sistem informasi Pendataan Kelompok Anak di dalam Sekolah.	Jumlah Kelompok PATBM	13 kelompok	6 klp	46,15%	46,15%				
		Penguatan Kelompok Forum Anak	Jumlah Duta Forum anak yang terpilih	3 Org	3 org	100%					100%
		Pemetaan anak bermasalah dan potensi Partisipasi Anak	Jumlah Buku Pofil Anak	1 dokumen	1 dok	100%					100%
		Pembentukan dan Pembinaan Kota Layak Anak	Jumlah Kelurahan Layak Anak	7 lembaga	7 lembaga	100%					100%

Mencermati tabel diatas diketahui bahwa, dari 7 (tujuh) indikator kinerja program atau indicator eselon III yang diperjanjikan, semuanya memiliki interval  $\geq 90$  (sangat baik). Sedangkan untuk indicator kinerja kegiatan atau indicator eselon IV, dari 21 (dua puluh satu) indikator kinerja yang diperjanjikan, sebanyak 20 (dua puluh) indikator memiliki interval  $\geq 90$  (sangat baik), dan 1 (satu) indicator yang memiliki interval  $\leq 50$ .

### 3.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa tahun Terakhir.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator tahun 2019 dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran pada tahun sebelumnya.

#### **Pencapaian Sasaran Strategis I :**

#### **Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan**

Ketidaksetaraan gender masih menjadi isu besar meskipun sudah mengalami perubahan yang signifikan dalam dekade terakhir. Ketidaksetaraan gender ini ditandai dengan adanya ketimpangan relasi/kondisi (perbedaan, akses, partisipasi, kontrol, manfaat pembangunan) bagi laki-laki dan perempuan yang dipengaruhi oleh budaya dan kebijakan.

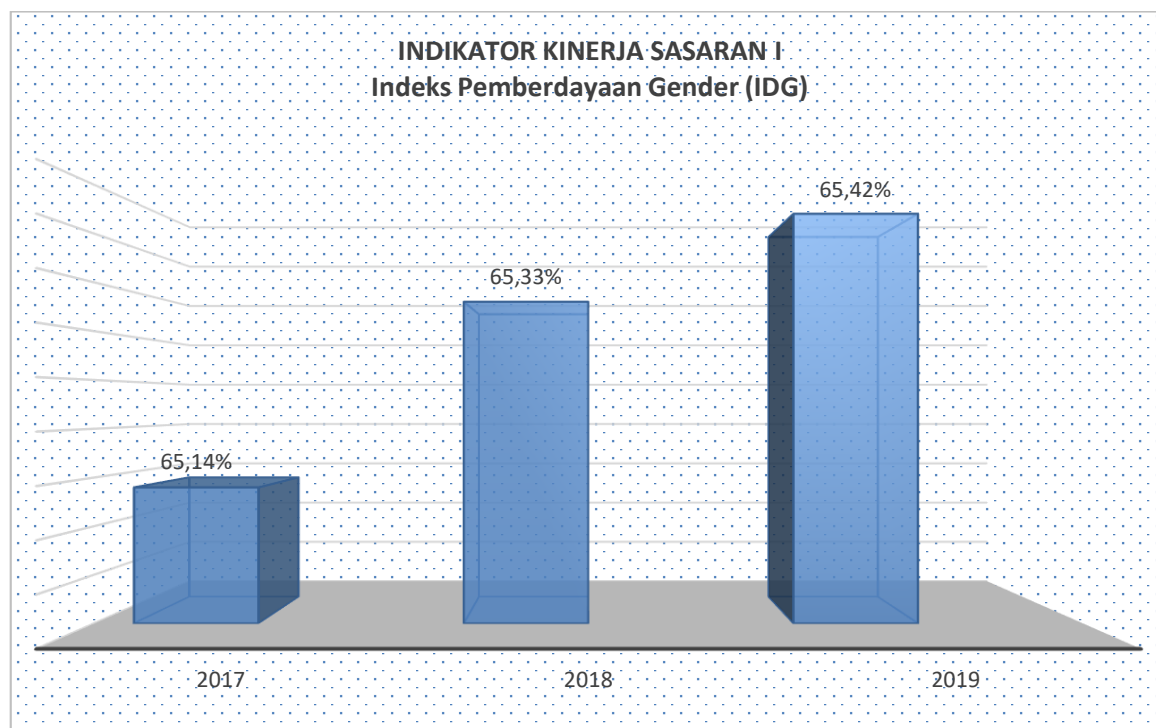
Gender dibedakan sebagai perbedaan fungsi dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi oleh masyarakat. Perbedaan tersebut pada praktiknya sering menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap kaum perempuan baik di lingkungan rumah tangga, pekerjaan masyarakat kultur, maupun negara. Oleh sebab itu untuk menghilangkan ketidakadilan tersebut diperlukan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam proses bermasyarakat dan bernegara.

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Pembangunan gender bertujuan untuk mewujudkan persamaan kualitas pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan. Meski masih belum menyamai laki-laki, kualitas pembangunan perempuan di Kota Bima selalu menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang terkait dengan pemberdayaan gender.

Adapun perbandingan capaian kinerja sasaran I pada masing-masing indikator tersebut dapat di lihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 1: Realisasi Indikator Kinerja Sasaran I Tahun 2017 s/d 2019



Untuk sasaran I yaitu Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan terdapat satu indikator yang dijadikan ukuran. Dari gambar di atas diketahui bahwa indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan. Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan kemajuan dalam hal kesetaraan gender. Adapun uraiannya sebagai berikut:

- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2019 adalah 65,42%, dari target sebesar 61,73% atau dengan prosentase capaian kinerja 105,98%. Capaian indikator kinerja tersebut jika di bandingkan dengan realisasi kinerja sebelumnya atau di tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 0,09 %, serta dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami kenaikan juga sebesar 0,09%.

Faktor yang mendorong tercapainya target kinerja indikator sasaran I adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen pimpinan daerah terkait upaya peningkatan pemberdayaan perempuan.
2. Adanya pembinaan pada organisasi-organisasi perempuan berkelanjutan di Kota Bima.
3. Adanya Pelatihan Kader Partai Politik Perempuan.
4. Adanya Pelatihan Kewirausahaan pada kelompok-kelompok usaha perempuan.
5. Adanya kerja sama dengan berbagai lintas sector terkait pembinaan dan pelatihan pada kelompok-kelompok usaha perempuan.
6. Pemberian bantuan berupa peralatan produksi jajanan pada kelompok-kelompok usaha perempuan.
7. Dimudahkannya pemberian bantuan modal/kredit usaha pada kelompok-kelompok usaha perempuan hasil kerjasama dengan berbagai lintas sector, terutama dengan pihak perbankan.

Untuk peningkatan kinerja kedepan, maka langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima adalah (1) Menyiapkan dukungan pendanaan yang memadai, (2) Mendorong sejumlah kebijakan yang lebih berpihak gender, (3) Membangun komitmen berbagai pihak, (4) Melakukan kampanye penyadaran tentang isu gender, serta (5) Mendorong setiap Perangkat Daerah (PD) untuk memahami bahwa isu gender sudah menjadi isu bersama dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam mencapai target kinerja sasaran strategis tersebut telah dilaksanakan dua program yaitu (1) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dan (2) Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan perempuan, dengan didukung berbagai kegiatan antara lain : (1) Pembinaan Organisasi Perempuan, (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender, (3) Kegiatan Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (4) Kegiatan Penyusunan dan Penerbitan Prodak Hukum Daerah dibidang Perlindungan Perempuan.



Adapun perbandingan capaian realisasi indikator eselon III dan eselon IV yang mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima antara Tahun 2019 dengan tahun 2018, dapat dilihat pada table sebagai berikut:

**Tabel 3.5: Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Eselon III dan IV Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2019 dengan Tahun 2018**

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	Realisasi 2019	Realisasi 2018
Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	persentase organisasi perempuan yang dibina	100%	80%
	Pembinaan organisasi perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan yang di bina	30 organisasi perempuan	30 organisasi perempuan
	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender	Jumlah kader gender yang dibina	35 kader	35 kader
	Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	58,55%	55,00%
	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah kader PUG di kota Bima	60 org	50 org
	Penyusunan dan Penerbitan Prodak Hukum Daerah dibidang Perlind. Perempuan.	Jumlah Perwali Perlindungan Perempuan	1 perwali	-

Dari table di atas diketahui bahwa pada Tahun 2019 indikator eselon III dan IV yang mendukung atas pencapaian sasaran strategis I memiliki realisasi rata-rata 100% bahkan lebih, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018. Sedangkan untuk satu indikator yaitu Jumlah Perwali Perlindungan Perempuan tidak dapat dibandingkan, karena penyusunan perwali tersebut baru dilakukan pada tahun 2019.

Untuk keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran III, dibutuhkan dukungan 2 (dua) program dengan 4 (empat) kegiatan. Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya tersebut dapat dikatakan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien, karena capaian kinerja menunjukkan persentase keberhasilan yang lebih tinggi dari pada persentase realisasi penggunaan dana. Adapun gambaran penggunaan anggaran untuk pencapaian indikator sasaran tersebut yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.6: Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran I Tahun 2019**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% PENYERAPAN	EFISIENSI
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,73%	65,42%	105,98	270.436.500	267.312.500	98,84	Efisien

**Pencapaian Sasaran Strategis II :**

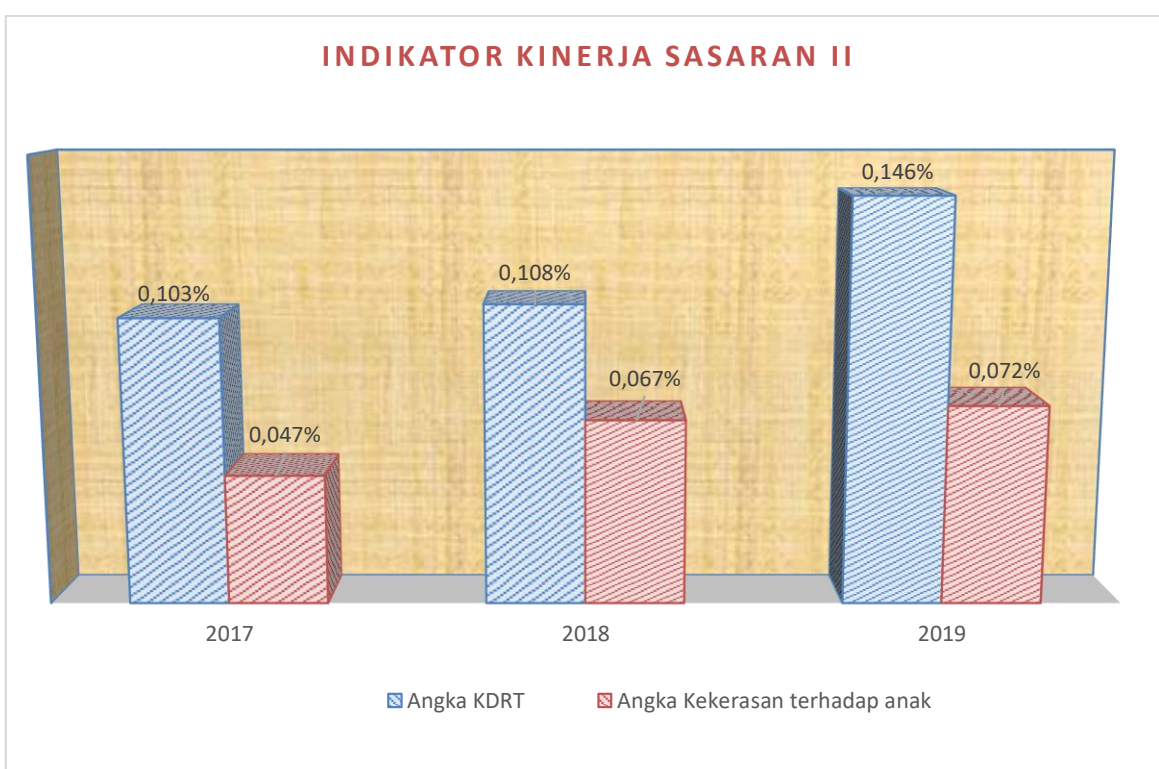
**Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak**

Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.

Sedangkan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Adapun perbandingan capaian kinerja sasaran II pada masing-masing indikator tersebut dapat di lihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 2: Realisasi Indikator Kinerja Sasar II Tahun 2017 s/d 2019



Untuk sasaran II yaitu Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak terdapat dua indikator yang dijadikan ukuran. Dari gambar di atas diketahui bahwa kedua indikator dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan persentase kasus kekerasan baik itu pada Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) maupun Angka kekerasan terhadap anak, walaupun pada tahun 2019 bila dibandingkan dengan target, masih dibawah target. Adapun uraiannya sebagai berikut:

- Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) capaian kinerja tahun 2019 masih dibawa adalah 0,146%, dari target sebesar 0,63% atau dengan prosentase capaian kinerja 176,83%. Capaian indikator kinerja tersebut jika dibandingkan dengan realisasi kinerja sebelumnya atau di tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 0,38 % atau 0,43% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017. Untuk indikator Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) walaupun masih dibawa target, namun diharapkan mengalami tren penurunan untuk menunjukkan perbaikan kinerja.
- Angka Kekerasan terhadap anak capaian kinerja tahun 2019 masih dibawa target adalah 0,072%, dari target sebesar 0,10% atau dengan prosentase capaian kinerja 128%. Capaian indikator kinerja tersebut jika dibandingkan dengan realisasi kinerja sebelumnya atau di tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 0,005% atau 0,025% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017. Untuk indikator Angka Kekerasan terhadap anak walaupun masih dibawa target, namun diharapkan mengalami tren penurunan untuk menunjukkan perbaikan kinerja.

Salah satu akibat dari terjadinya KDRT dan kekerasan lainnya yaitu dapat menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan sosial. Dampak yang ditimbulkan pun sedemikian kompleks serta penderitaan yang dialami korban akan membekas sepanjang hidupnya.

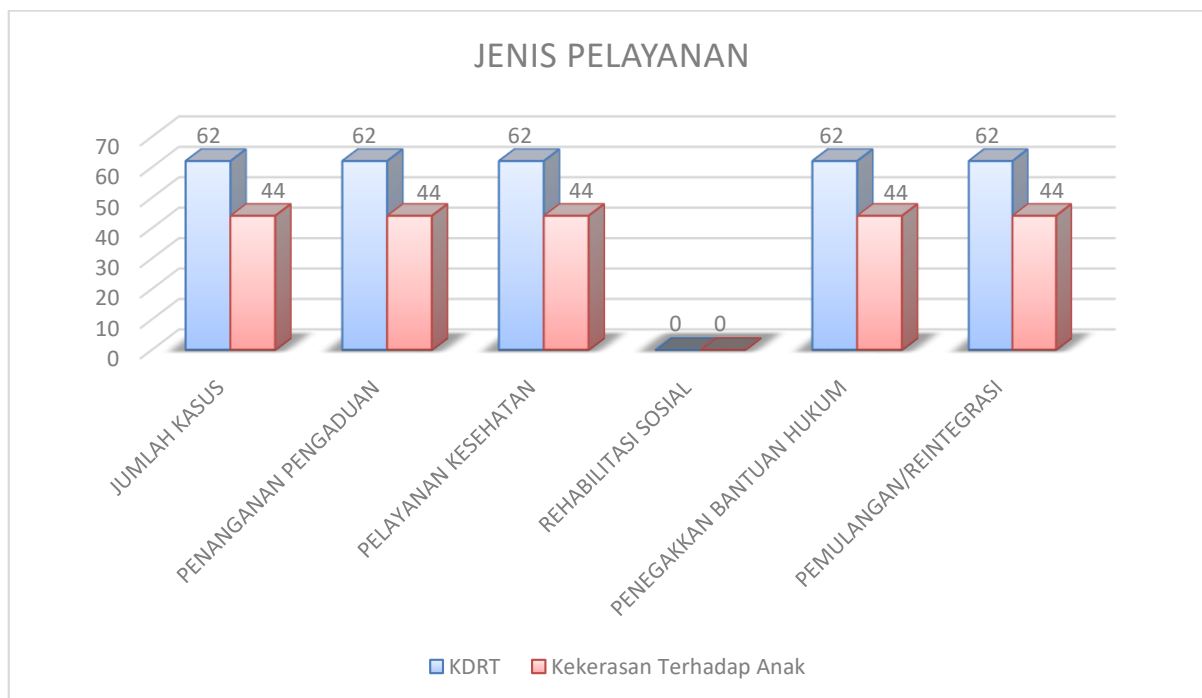
Kenaikan jumlah kasus kekerasan tersebut dipercepat oleh kemajuan teknologi informasi yang semakin terjangkau oleh masyarakat sehingga memerlukan langkah-langkah preventif dan antisipatif.

Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat untuk ikut serta berperan aktif mendukung pemerintah dalam pencegahan dan penanganan kekerasan ini.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan yang berkaitan atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan, secara fisik, seksual, psikologis, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kebebasan baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan rumah tangga.

Lima jenis layanan yang merupakan hak korban yaitu layanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Berikut adalah pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima selama Tahun 2019.



Dari gambar di atas diketahui bahwa, hampir semua kasus KDRT dan kekerasan kepada anak 100% telah mendapatkan pelayanan yang optimal.

Faktor yang mendorong tercapainya target kinerja indikator sasaran II adalah sebagai berikut:

1. Adanya Pelatihan peningkatan SDM Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kelurahan.
2. Adanya pembentukan Forum Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan.

Walaupun pada tahun 2019 capaian indikator kinerja sasaran III yaitu Angka KDRT dan Angka Kekerasan Terhadap Anak masih dibawah target kinerja, namun kejadian kasus KDRT dan Kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan beberapa kendala antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang substansi Undang-undang PKDRT dan UU Perlindungan Anak.
2. Masyarakat belum semuanya mendapatkan sosialisasi terkait Peraturan Pendewasaan Usia perkawinan (PUP).
3. Belum adanya satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
4. Belum tersedianya personil Psikolog Klinis dan Petugas Pengawas Kekerasan Perempuan dan Anak yang sangat krusial diperlukan dalam penanganan kekerasan perempuan dan anak.

Untuk peningkatan kinerja kedepan, maka langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima adalah menyiapkan dukungan pendanaan yang memadai, pembentukan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di setiap kelurahan, Peningkatan kapasitas SDM pada setiap layanan, membentuk lembaga layanan di setiap kelurahan yang belum ada, koordinasi berkelanjutan dan membangun komitmen dengan pihak-pihak terkait.

Dalam mencapai target kinerja sasaran strategis tersebut telah dilaksanakan dua program yaitu (1) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan (2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, dengan didukung berbagai kegiatan antara lain: (1) Kegiatan Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dlm pelayanan dan pendampingan korban KDRT, (2) Kegiatan Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan, (3) Kegiatan Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan, (4) Kegiatan Pelaksanaan kebijakan perlindungan Hak perempuan dan Anak di daerah, 5) Kegiatan Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT, 6) Kegiatan Pendampingan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan, 7) Kegiatan Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan, 8) Kegiatan Kegiatan pengemb. pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan P2TP2A, 9) Kegiatan Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan, 10) Kegiatan Pembinaan/Evaluasi pelaksanaan PUG dan, 11) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak.

Adapun perbandingan capaian realisasi indikator eselon III dan eselon IV yang mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima antara Tahun 2019 dengan tahun 2018, dapat dilihat pada table sebagai berikut:

**Tabel 3.7: Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Eselon III dan IV Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2019 dengan Tahun 2018**

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	Realisasi 2019	Realisasi 2018
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	100	100
		Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Anak yang ditangani	100	100

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	Realisasi 2019	Realisasi 2018
	Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dlm pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Jumlah pelatih Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan dan pendampingan korban KDRT	40 org	40 org
	Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan	Jumlah Data kesepakatan organisasi dan Lembaga masyarakat yang ada dalam sistim perlindungan anak melalui aturan tentang PUP	3 kesepakatan	1 kesepakatan
	Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	- Jumlah kelompok usaha ekonomi produktif bagi perempuan EX TKI. - Jumlah alat produksi Kue	- 112 org - 28 pkt	- 100 org - 25 pkt
	Pelaksanaan kebijakan perlindungan Hak perempuan dan Anak di daerah	Jumlah data KDRT di lima Kecamatan se Koyta Bima	40 org	40 org
	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Adanya laporan terhadap sistim Catpor kekerasan perempuan dan anak secara falid	120 org	40 org
	Kegiatan Pendampingan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Jumlah Data kekerasan khusus anak di tingkat kecamatan dan kota	40 orang	35 org
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase OPD Yang menganggarkan PUG	28%	22%
		Porsentase lembaga PUG yang Aktif	33%	32%
	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG	28 OPD	28 OPD
	Kegiatan pengemb. pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan P2TP2A	Jumlah peserta P2TP2A yang berkualitas pada 5 Kecamatan	40 orang	40 orang
	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan	Jumlah peserta Pelatihan Kewirausahaan dan kelompok usaha ekonomi ekonomi produktif bagi perempuan	40 org	100 org
	Pembinaan/Evaluasi pelaksanaan PUG	Jumlah Data SKPD terpilah yang responsif gender	28 SKPD	28 SKPD
	Pengembangan Sistim Informasi Gender dan Anak	Jumlah perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan serta eksplotasi dan penelantaran lainya terhadap anak	50 org	50 org

Untuk keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran II, dibutuhkan dukungan 2 (dua) program dengan 11 (sebelas) kegiatan. Dari hasil analisis efisiensi

penggunaan sumber daya tersebut dapat dikatakan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien, karena capaian kinerja menunjukkan persentase keberhasilan yang lebih tinggi dari pada persentase realisasi penggunaan dana. Adapun gambaran penggunaan anggaran untuk pencapaian indikator sasaran tersebut yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.8: Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran II Tahun 2019**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% PENYERAPAN	EFISIENSI
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Angka KDRT	0,63%	0,146%	176,83	287.356.000	283.881.000	98,79	Efisien
	Angka Kekerasan terhadap anak	0,10%	0,072%	128,00	258.221.500	255.682.100	99,02	Efisien

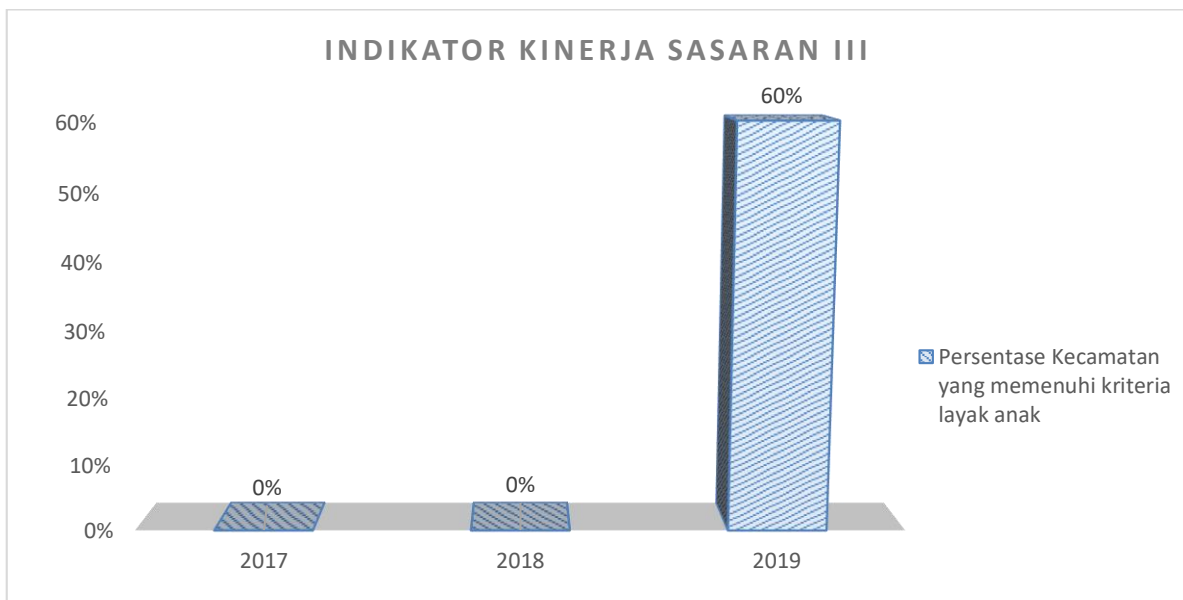
### **Pencapaian Sasaran Strategis III :**

#### **Meningkatnya Pemenuhan hak anak**

Isu hak dan perlindungan anak, bukan hanya isu daerah tertentu, melainkan menjadi isu nasional dan internasional. Perhatian terhadap anak, dalam artian memenuhi hak dan memberikan perlindungan merupakan faktor penting, karena anak adalah manusia muda yang rentan, bergantung, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Sehingga Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Adapun perbandingan capaian indikator kinerja untuk sasaran III dapat di lihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 4: Realisasi Indikator Kinerja Sasar III Tahun 2017 s/d 2019



Untuk sasaran III yaitu Meningkatnya Pemenuhan hak anak terdapat satu indikator yang dijadikan ukuran. Dari gambar di atas diketahui bahwa indikator Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan. Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak capaian kinerja tahun 2019 masih di atas target adalah 60%, dari target sebesar 20% atau dengan prosentase capaian kinerja 300%. Capaian indikator kinerja tersebut jika dibandingkan dengan realisasi kinerja sebelumnya atau di tahun 2018 dan tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 60%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2017 dan 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak masih merintis instrumen-instrumen untuk menuju Kota Layak Anak (KLA), mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun di tingkat Kota sendiri.

Kota Layak Anak (KLA) merupakan wujud komitmen pemerintah kota untuk menggerakkan semua sumber daya yang dimiliki dalam rangka pemenuhan hak-hak anak diberbagai bidang, sehingga menjadikan Kota Bima sebagai Kota Layak Anak.

Kota Layak Anak adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Sistem pembangunan kota berbasis hak anak menempatkan anak dalam arus utama pembangunan. Hak dan perlindungan anak dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan kota, sehingga kota yang dibangun bisa bersahabat dengan anak, dan menjadi lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Untuk menuju Kota Layak anak (KLA) sejumlah prasyarat harus dipenuhi. Salah satunya mewujudkan Kecamatan Layak Anak.



Adapun pencapaian kinerja sasaran ini melebihi dari target, tingkat capaian kinerja sasaran ini dapat diukur dengan Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak dimana target yang diperjanjikan sebanyak 20%, sedangkan realisasi Tahun 2019 sebanyak 60% (3) Kecamatan Layak Anak dengan rasio pencapaiannya sebesar 300%.

Kecamatan ini dikategorikan sebagai Kecamatan layak anak dimana ditunjang oleh beberapa indikator seperti tersedianya kelembagaan ramah ( puskesmas ramah anak, sekolah ramah anak, PATBM, Forum Anak, Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak), tersedianya ruang laktasi, tersedianya ruang bermain untuk anak.

Adapun Indikator Kecamatan Layak Anak adalah sebagai berikut :

- a) Penguatan kelembagaan
  - 1) Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak.
  - 2) Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan.
  - 3) Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum anak dan kelompok lainnya.
  - 4) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak kedalam kebijakan, program dan kegiatan.
  - 5) Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan.
  - 6) Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak.
  - 7) Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
- b) Untuk pemenuhan indikator tersebut di atas, terbagi menjadi 5 klaster sebagai berikut :
  - \* **Klaster I** : Hak sipil dan kebebasan
    - 1) Persentase anak yang terintegrasi dan mendapatkan kutipan akte kelahiran
    - 2) Tersedia fasilitas informal layak anak
    - 3) Jumlah kelompok anak, termasuk forum anak, yang ada di Kota, Kecamatan dan Kelurahan
  - \* **Klaster II** : Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
    - 1) Persentase usia perkawinan pertama dibawah 18 tahun
    - 2) Tersedianya lembaga konsultasi bagi orang tua/ keluarga tentang pengasuhan
    - 3) perawatan anak
    - 4) Tersedianya lembaga kesejahteraan sosial anak
  - \* **Klaster III** : Kesehatan dasar dan kesejahteraan
    - 1) Angka kematian bayi (AKB)
    - 2) Prevalensi kekurangan gizi pada balita
    - 3) Persentase ASI eksklusif

- 4) Jumlah pojok ASI
- 5) Persentase imunisasi dasar lengkap
- 6) Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental
- 7) Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan
- 8) Persentase rumah tangga dengan akses air bersih
- 9) Tersedianya kawasan tanpa rokok

\* **Klaster IV** : Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya

- 1) Angka partisipasi pendidikan anak usia dini
- 2) Persentase wajib belajar 12 tahun
- 3) Persentase sekolah ramah anak
- 4) Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah
- 5) Tersedianya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

\* **Klaster V** : Perlindungan khusus

- 1) Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan
- 2) Persentase kasus anak berhadapan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative Justice)
- 3) Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak.
- 4) Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Merujuk pada indikator di atas, pada tahun 2019 telah teralisasi 3 (tiga) Kecamatan yang sudah memenuhi kriteria layak anak. Pencapaian kinerja sasaran ini melebihi dari target, dimana target yang diperjanjikan sebanyak 20%, sedangkan realisasi Tahun 2019 sebanyak 60% (3) Kecamatan Layak Anak dengan rasio pencapaian sebesar 300%.

Adapun faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja tersebut antara lain: (1) Kelembagaan Forum Anak di level Kota, kecamatan dan kelurahan cukup aktif, (2) Adanya Gugus Tugas KLA di level Kota, Kecamatan dan Kelurahan walaupun belum berjalan secara maksimal, (3) Keterlibatan lintas sektor terkait, serta (4) Adanya program yang relevan oleh pihak eksternal terkait anak.

Walaupun pada Tahun 2019 telah mampu melebihi dari target kinerja yang di perjanjikan, namun masih belum mampu mendongkrak untuk pencapaian predikat Kota Bima sebagai Kota Layak Anak. Adapun hambatannya sebagai berikut:

1. Belum adanya regulasi dalam hal ini Peraturan Daerah terkait Kota Layak Anak.
2. Masih kurangnya pemahaman beberapa lintas sektor sebagai mitra, terkait kebutuhan dari Kota Layak Anak.
3. SDM masih rendah untuk program anak, baik di lingkup internal maupun eksternal.
4. Anggaran program anak di level Kecamatan dan Kelurahan masih belum memadai serta,
5. Anak masih dianggap belum memiliki kemampuan untuk dilibatkan dalam hal proses perencanaan pembangunan.

Untuk peningkatan kinerja kedepan, maka langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah menyiapkan dukungan pendanaan yang memadai, mendorong sejumlah kebijakan yang lebih berpihak, membangun komitmen para pihak, melakukan pembinaan secara terus menerus kepada forum-forum dan kelembagaan anak yang ada di Kota Bima, Kampanye penyadaran terhadap masyarakat tentang keberadaan anak, Serta Pentingnya mendorong program Kota Layak Anak untuk dianggarkan di level Kecamatan dan Kelurahan dalam mewujudkan Kota Bima sebagai Kota Layak Anak (KLA).

Dalam mencapai target kinerja sasaran strategis tersebut telah dilaksanakan satu program yaitu (1) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, dengan didukung berbagai kegiatan antara lain: (1) Pengembangan Kota Sebagai Kota Layak Anak (KLA), (2) Pengembangan sistem informasi Pendataan Kelompok Anak di dalam Sekolah, (3) Penguatan Kelompok Forum Anak, (4) Pemetaan anak bermasalah dan potensi Partisipasi Anak, 5) Pembentukan dan Pembinaan Kota Layak Anak.

Adapun perbandingan capaian realisasi indikator eselon III dan eselon IV yang mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima antara Tahun 2019 dengan tahun 2018, dapat dilihat pada table sebagai berikut:

**Tabel 3.9: Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Eselon III dan IV  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima  
Tahun 2019 dengan Tahun 2018**

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	Realisasi 2019	Realisasi 2018
Meningkatnya Pemenuhan hak anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Prosentase Kelompok Forum Anak yang Aktif	23,40%	2,13%
	Pengembangan Kota Sebagai Kota Layak Anak (KLA)	Jumlah Gugus Tugas Tingkat Kecamatan	3 kec	0 kec
	Pengembangan sistem informasi Pendataan Kelompok Anak di dalam Sekolah.	Jumlah Kelompok PATBM	6 klp	1 klp
	Penguatan Kelompok Forum Anak	Jumlah Duta Forum anak yang terpilih	3 org	3 org
	Pemetaan anak bermasalah dan potensi Partisipasi Anak	Jumlah Buku Pofil Anak	1 dok	1 dok
	Pembentukan dan Pembinaan Kota Layak Anak	Jumlah Kelurahan Layak Anak	7 lembaga	0 lembaga

Untuk keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran III, dibutuhkan dukungan 1 (satu) program dengan 5 (lima) kegiatan. Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya tersebut dapat dikatakan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien, karena capaian kinerja menunjukkan persentase keberhasilan yang lebih tinggi dari pada persentase realisasi penggunaan dana. Adapun gambaran penggunaan anggaran untuk pencapaian indicator sasaran tersebut yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.10: Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran III Tahun 2019**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% PENYERAPAN	EFISIENSI
Meningkatnya Pemenuhan hak anak	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	20%	60%	300%	274.446.000	240.542.400	87,65	Efisien

### 3.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis organisasi.

Adapun gambaran perbandingan realisasi capaian kinerja sasaran Tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.11: Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Tahun 2019 dengan Target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2019	TARGET RENSTRA 2018-2023	CAPAIAN 2019
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65.42%	67.81%	96.48%
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Angka KDRT	0.146%	0.55%	173.45%
	Angka Kekerasan terhadap anak	0.072%	0.057%	74.33%
Meningkatnya Pemenuhan hak anak	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	60%	100%	60.00%

Dari table di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 terdapat 1 (satu) indikator yang memiliki capaian yang melebihi target renstra Tahun 2023 yaitu (1) indikator Angka KDRT.

Adapun perbandingan capaian indikator kinerja Angka KDRT Tahun 2019 dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2023, maka capaian kinerja sudah mencapai 173,45%.

Selain dari pada itu, pada tahun 2019 terdapat 3 (tiga) indikator yang memiliki capaian belum mencapai target bila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 yaitu (1) indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yaitu sebesar 96,48%, (2) indikator Angka Kekerasan terhadap anak sebesar 74,33%, serta (3) Indikator Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak sebesar 60%. Hal ini berarti masih diperlukan langkah-langkah tindak lanjut yang lebih strategis pada tahun berikutnya sehingga target renstra dapat dicapai.

## B. Realisasi Anggaran

### 1. Target dan Realisasi Belanja

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima pada tahun 2019 telah melaksanakan seluruh program kegiatan yang telah menghasilkan berbagai macam tingkat capaian yang didasari dari berbagai macam indikator sasaran maupun pada 8 program dan 40 Kegiatan. Sebagaimana yang tertuang di dalam Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA-SKPD) mendapat alokasi sebesar Rp. 3.642.985.309,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.531.834.003,- dan capaian

persentase sebesar 96,95%. Adapun rincian alokasi dan realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

Lebih rinci, anggaran dan realisasi keuangan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.12.**  
**Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima**  
**Tahun 2019**

No	Uraian	Anggaran Yang Tersedia (Rp)	Realisasi Anggaran Yang digunakan (Rp)	Realisasi (%)
<b>1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1,719,445,109</b>	<b>1,672,515,603</b>	<b>97.27%</b>
	Belanja Pegawai	1,719,445,109	1,672,515,603	97.27%
<b>2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1,923,540,200</b>	<b>1,859,318,400</b>	<b>96.66%</b>
	Belanja Pegawai	364,773,000	344,123,000	94.34%
	Belanja Barang dan Jasa	1,456,437,200	1,413,205,000	97.03%
	Belanja Modal	102,330,000	101,990,400	99.67%
	<b>JUMLAH</b>	<b>3,642,985,309</b>	<b>3,531,834,003</b>	<b>96.95%</b>

Sehubungan dengan pengelolaan Anggaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa secara garis besar pelaksanaan dan pengelolaan keuangan telah sesuai dengan aturan dan prosedur administrasi keuangan yang berlaku, dengan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu hemat, efisien dan efektif serta mengusahakan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan.

## **2. Pengukuran Kinerja Keuangan**

Selama Tahun Anggaran 2019, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima melaksanakan 8 delapan) Program dan 40 (empat puluh satu) kegiatan. Adapun hasil pengukuran kinerja keuangan terhadap pelaksanaan program/kegiatan utama sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019.

Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan utama, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima pada tahun 2019 juga menyelenggarakan program dan kegiatan rutin sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 3.13**  
**Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Rutin dan Wajib**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima**  
**Tahun 2019**

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
<b>A. Program Administrasi Perkantoran</b>		<b>575,670,200</b>	<b>566,190,500</b>	<b>98.35</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	44,940,000	44,940,000	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	11,100,000	7,926,000	71.41
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	74,950,000	69,892,200	93.25
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	38,848,000	38,798,000	99.87
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	23,490,000	23,485,200	99.98
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	44,266,000	44,243,500	99.95
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33,370,000	33,135,200	99.30
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	3,470,000	3,450,000	99.42
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	38,130,000	38,070,000	99.84
10	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	27,065,000	26,910,000	99.43
11	Penyediaan Makanan dan minuman	26,100,000	25,459,700	97.55
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	209,941,200	209,880,700	99.97
<b>B. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>		<b>96,405,000</b>	<b>96,084,900</b>	<b>99.67</b>
1	Pengadaan Mebelair	64,200,000	63,920,400	99.56
2	Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas / operasional	14,305,000	14,291,000	99.90
3	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4,250,000	4,250,000	100.00
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	13,650,000	13,623,500	99.81
<b>C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>22,760,000</b>	<b>22,660,000</b>	<b>99.56</b>
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	22,760,000	22,660,000	99.56
<b>D. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan</b>		<b>138,245,000</b>	<b>126,965,000</b>	<b>91.84</b>
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	30,120,000	30,020,000	99.67
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	9,082,500	9,082,500	100.00
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	8,880,000	-	0.00

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
4	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan RKA/DPA/DPPA SKPD	69,665,000	68,165,000	97.85
5	Penyusunan LAKIP. LPJ. SPM dan LPPD	20,497,500	19,697,500	96.10
<b>E. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>		<b>122,600,000</b>	<b>120,026,000</b>	<b>97.9</b>
1	Pelaksanaan sosialisasi yang berkaitan dengan kesetaraan gender PP dan perlindungan anak	18,888,500	18,528,500	98.09
2	Penyusunan dan Penerbitan Prodak Hukum Daerah dibidang Perlindungan Perempuan	103,711,500	101,497,500	97.87
<b>F. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>		<b>489,072,000</b>	<b>453,188,000</b>	<b>92.66</b>
1	Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan	26,216,000	26,036,100	99.31
2	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan P2TP2A	34,140,000	33,610,000	98.45
3	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	102,051,500	101,966,800	99.92
4	Evaluasi pelaksanaan PUG	26,262,000	25,542,000	97.26
5	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	25,956,500	25,490,700	98.21
6	Pengembangan Kota Sebagai Kota Layak Anak (KLA)	71,247,500	63,360,300	88.93
7	Pengembangan sistem informasi Pendataan Kelompok Anak di dalam Sekolah.	46,499,000	46,499,000	100.00
8	Penguatan Kelompok Forum anak	113,191,000	111,262,600	98.30
9	Pemetaan Anak bermasalah dan potensi Partisipasi Anak	7,790,000	7,790,000	100.00
10	Pembentukan dan Pembinaan Kota Layak anak	35,718,500	11,630,500	32.56
<b>G. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak</b>		<b>330,951,500</b>	<b>326,917,500</b>	<b>98.78</b>
1	Pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan dan anak di Daerah	23,931,000	23,929,000	99.99
2	Pelatihan Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan dan pendampingan korban KDRT	35,928,500	35,378,500	98.47
3	Panenyusunan sistem perlindungan bagi perempuan	70,645,000	70,635,000	99.99
4	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	180,782,500	177,867,500	98.39



No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
5	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	0	-	#DIV/0!
6	Kegiatan pendampingan dan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	19,664,500	19,107,500	97.17
<b>H. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan</b>		<b>147,836,500</b>	<b>147,286,500</b>	<b>99.63</b>
1	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	137,873,500	137,323,500	99.60
2	Pelatihan Pendidikan Kebangsaan berspektif Gender	9,963,000	9,963,000	100.00
<b>JUMLAH</b>		<b>1,923,540,200</b>	<b>1,859,318,400</b>	<b>96.66</b>

Sehubungan dengan pengelolaan Anggaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa secara garis besar pelaksanaan dan pengelolaan keuangan telah sesuai dengan aturan dan prosedur administrasi keuangan yang berlaku, dengan sistim pelaporan dan pertanggungjawaban yang telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu hemat, efisien dan efektif serta mengusahakan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan.

# BAB IV PENUTUP

## 4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima tahun 2019 memiliki nilai strategis karena penyelenggarantugas pokok dan fungsi selama tahun 2019 merupakan tahun ketiga RPJMD Kota Bima 2018-2023 dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2023.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat baik atas sasaran-sasaran strategisnya yang terukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian ini dilaksanakan melalui program dan kegiatan pokok maupun pendukung yang telah dilaksanakan dengan baik selama tahun 2019.

Sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam penetapan kinerja tahun 2019 semuanya telah direalisasikan dengan kategori Berhasil dengan rata-rata capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis sebesar 100,00% bahkan lebih, sedangkan realisasi penyerapan anggaran (Keuangan) sebesar 96,95%.

Rata-rata capaian sasaran strategis adalah sebesar lebih dari 100,00% yang terukur melalui 4 (empat) indikator kinerja utama. Capaian sasaran strategis I yang terukur melalui 1 (satu) indikator kinerja adalah sebesar 105,37% dan capaian sasaran strategis II yang terukur melalui 2 (dua) indikator kinerja adalah sebesar 152,41% Serta capaian sasaran strategis III yang terukur melalui 1 (satu) indikator kinerja adalah sebesar 300,00.

Rata-rata capaian sasaran strategis I, II, dan III terhadap target jangka menengah Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima lebih dari 100%. Adapun capain kinerja dari masing-masing sasaran strategis terhadap target jangka menengah adalah Sasaran I Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan sebesar 99,51%, Sasaran II Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan Anak sebesar 123,89% dan Sasaran III Meningkatnya Pemenuhan hak anak sebesar 60,00%. Sehingga rata-rata capaian kinerja tahun 2019 terhadap target jangka menengah Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak adalah sebesar 101,36%.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2019 sudah terpenuhi sesuai dengan harapan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan, pengendalian dan pelaporan pada tahun 2019 telah berjalan dengan baik.

## 4.2. Rekomendasi Pemecahan Masalah

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima yang menjadi tujuan dari penyusunan LKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting bagi Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak sebagai bahan dan masukan yang baik untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Berbagai permasalahan yang masih dihadapi serta upaya pemecahan masalah yang sudah dirumuskan tidak akan terlaksana jika tidak ditindaklanjuti dengan baik di masa yang akan datang. Tindak lanjut yang dimaksud adalah upaya konkret untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak melalui program dan kegiatan secara konsisten dan optimal. Dengan demikian, LKIP dapat menjadi instrumen yang efektif bagi sistem monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Memperhatikan sejumlah kekurangan dalam proses perencanaan pembangunan yang masih dihadapi hingga saat ini dan dalam rangka memperkuat peran kelembagaan Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima agar dapat menjadi organisasi pelaksana teknis pembangunan daerah dalam melaksanakan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak yang lebih baik di masa yang akan datang, maka perlu beberapa langkah tindaklanjut yang dapat diupayakan untuk tahun berikutnya seperti sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya data dan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan, Data dan informasi merupakan salah satu elemen vital guna mendukung kegiatan PP dan PA. Kekurangan dan keterbatasan data dan informasi tersebut diharapkan menjadi pertimbangan dan bahan masukan penting demi penyediaan dan penyempurnaan data-data pendukung yang diperlukan dalam perencanaan Dinas PP dan PA.
2. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama *stakeholders* dengan Dinas PP dan PA. Kota Bima.
3. Dinas PP dan PA. Kota Bima. harus terus meningkatkan partisipasi dan kerjasama dengan berbagai *stakeholder* yang ada di Kota Bima seperti masyarakat, DPRD, Perguruan Tinggi, dan lain sebagainya. Peningkatan

partisipasi dan kerjasama ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan efektifitas perencanaan di Dinas PP dan PA. Kota Bima.

4. Belum optimalnya pelayanan prima dalam Dinas PP dan PA.

Sebagai lembaga teknis daerah yang berfungsi sebagai pelayanan publik dalam bidang PP dan PA, maka sudah tentu Dinas PP dan PA. Kota Bima harus berorientasi pada pelayanan prima dan ini dilakukan terlebih dahulu dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dalam melayani publik. Pelayanan prima ini diharapkan bisa menimbulkan kepuasan (*satisfaction*) bagi pihak-pihak yang terkait dengan Dinas PP dan PA. Kota Bima, terutama masyarakat Kota Bima.

5. Belum optimalnya kapasitas aparatur Dinas PP dan PA Kota Bima.

Keberadaan aparatur PP dan PA merupakan unsur penting dalam setiap pengambilan keputusan perencanaan, oleh karenanya peningkatan kapasitas aparatur merupakan sebuah komitmen untuk meningkatkan kualitas dalam bidang PP dan PA.

6. Penempatan aparatur berdasarkan analisa beban kerja yang sudah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan masing-masing sumber daya aparatur yang ada (*right man on the right place*).

Akhirnya, besar harapan kami Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima ini dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel serta sebagai media evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kota Bima dalam rangka merencanakan Pembangunan Daerah dan menciptakan *Good Governance* di lingkungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima yang tentunya tak mungkin berhasil tanpa bantuan dari segala pihak.

Raba-Bima, Februari 2020

/ Kepala DPP – PA

